

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang mengurus sengketa yang terjadi pada pelaksanaan administrasi negara atau tata usaha negara. Sama seperti beberapa lembaga peradilan lainnya, PTUN saat ini sudah mulai menerapkan sistem informasi dalam pelaksanaan aktifitas instansinya. Salah satu dari sistem informasi yang telah diterapkan di PTUN adalah Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (SIAD-PTUN). Aplikasi SIAD-PTUN merupakan aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam mengolah data administrasi perkara. Data administrasi yang dimaksud adalah data gugatan dan data persidangan. Data gugatan yang dimaksud meliputi data penggugat, tergugat, objek sengketa, dan lain sebagainya. Data persidangan yang dimaksud adalah data pada form panggilan para pihak, berita acara sidang, jadwal pelaksanaan sidang, dan lain sebagainya.

Walaupun telah menggunakan sistem informasi dalam pengolahan data perkara, PTUN-Padang masih mengandalkan sistem manual dalam aktifitas penerimaan perkara. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dalam proses penerimaan perkara tersebut Penggugat harus datang langsung ke PTUN-Padang untuk mengajukan perkara yang dimilikinya. Proses mengajukan perkara secara langsung merupakan metode yang cukup baik. Karena dengan cara ini penggugat dapat langsung berinteraksi dengan petugas yang menerima gugatan dan penggugat bisa mendapatkan pengarahan tentang perkara yang diajukannya dari petugas tersebut. Akan tetapi, pengajuan perkara secara langsung memiliki kekurangan. Pihak penggugat yang tidak berdomisili di kota Padang harus mengalokasikan biaya dan waktu ekstra hanya untuk mengurus proses administrasi. Dengan kemajuan teknologi saat ini harusnya pengajuan perkara dapat dilakukan dimana saja. Salah satu pemecahan masalahnya dapat dengan

membangun sistem informasi yang dapat menangani permasalahan pada aktifitas administrasi pengajuan perkara.

Pengajuan perkara dengan penerapan sistem informasi bukan merupakan hal yang baru. Sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang sistem informasi pengajuan perkara. Salah satunya Laporan Akhir oleh Octari Ameliya Kirti dengan judul Sistem Informasi Pendaftaran Perkara Online Pada Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A. Selain itu, beberapa pengadilan di Indonesia juga sudah menerapkan sistem informasi pada aktifitas tersebut, sebagian lainnya masih merencanakan sistem tersebut sebagai inovasi baru. Salah satu pengadilan yang telah menerapkan sistem seperti ini yaitu, Pengadilan Agama Ponorogo. Hal tersebut tertera dalam tulisan Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 Sistem Informasi Pendaftaran Perkara (SIDaRa) dengan penanggung jawab Drs. Abdullah Shofwandi, yang menjelaskan mengenai sistem informasi pendaftaran perkara yang diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo.

Berdasarkan permasalahan yang ada, dan dengan penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis berkeinginan untuk membuat sebuah sistem informasi yang berjudul **“Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Perkara Gugatan Tingkat Pertama Berbasis Web Dengan Fitur Mobile (Studi Kasus: Bagian Kepaniteraan Muda Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang)”**. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan proses administrasi pada bagian kepaniteraan muda perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berjalan dengan efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang dapat diangkat, yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi administrasi pengajuan perkara yang dapat mengatasi permasalahan yang ada.

1.3 Batasan Masalah

Dari permasalahan yang sudah dirumuskan, agar penelitian ini tidak melenceng dari yang diharapkan, maka ditentukan batasan masalah terhadap penelitian ini meliputi beberapa poin sebagai berikut.

- a. Ruang lingkup perancangan ini mencakup pengajuan perkara, pengesahan gugatan, pemeriksaan gugatan, pengesahan penetapan majelis hakim.
- b. Ruang lingkup yang tidak termasuk dalam perancangan adalah pengelolaan data keuangan perkara, pembuatan surat penetapan, pemrosesan pemeriksaan dismissal, pengajuan perkara gugatan perlawanan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk merancang sistem informasi berdasarkan analisis proses tatalaksana yang sedang berjalan.
- b. Untuk membangun sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna berdasarkan analisis dari proses tatalaksana yang sedang berjalan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan dua tahap, yaitu tahap persiapan awal dan tahap pengembangan sistem informasi.

1.5.1 Tahap Persiapan Awal

Tahap persiapan awal dilakukan pengumpulan data terhadap objek penelitian, yaitu proses administrasi pengajuan perkara. Pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari beberapa cara, yaitu:

- a. Tinjauan Lapangan
Analisis terhadap bagaimana proses administrasi pengajuan perkara yang berjalan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.
- b. Analisis dokumen terkait

Analisis terhadap dokumen yang digunakan pada aktifitas instansi dalam proses administrasi dan pengelolaan data perkara. Dokumen yang dimaksud dapat berupa buku register yang dibutuhkan dalam pencatatan, lembaran-lembaran penetapan atau pemanggilan, dan lain sebagainya.

c. Studi pustaka

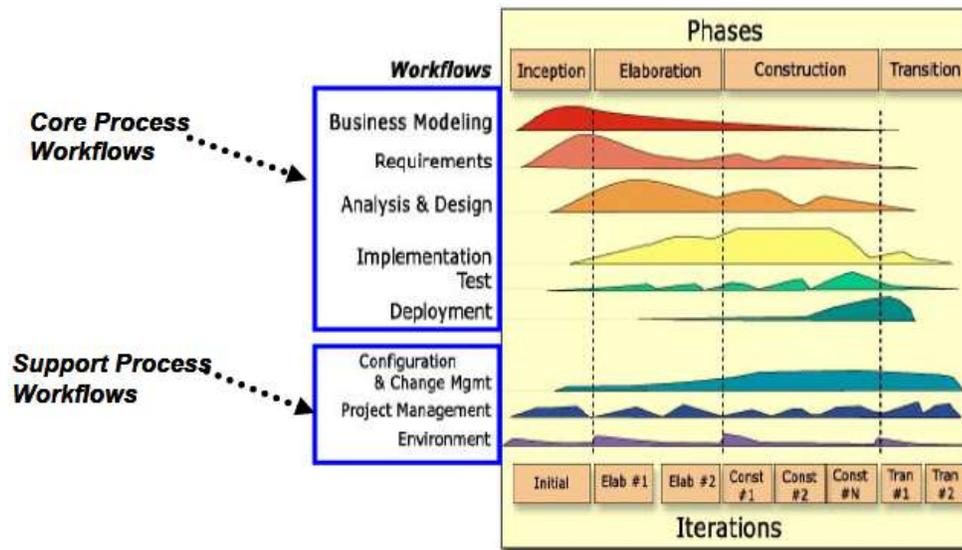
Pencarian data dengan cara studi pustaka dapat berupa tulisan dalam undang-undang, buku panduan, *Standart Operation Procedure*, artikel, berita, jurnal maupun buku-buku lain yang bersesuaian dengan aplikasi yang akan dibuat juga dibutuhkan dalam peng-

d. Wawancara

Untuk hal yang tidak dapat dipahami dalam analisa dokumen dan pemahaman studi pustaka dilakukan wawancara yang dapat menanamkan pemahaman yang lebih dalam terhadap permasalahan yang ada.

1.5.2 Tahap Pengembangan Sistem Informasi

Metode yang digunakan dalam pembangunan perangkat lunak ini adalah metode pengembangan *Rational Unified Process*. RUP menggunakan konsep *object oriented*, dengan aktifitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan *Unified Model Language (UML)* (Siswantoro, 2013). Arsitektur RUP memiliki dua dimensi, yaitu dimensi horizontal yang menyatakan fase dari pengembangan perangkat lunak dan dimensi vertikal yang menyatakan langkah-langkah atau workflow dari pengembangan perangkat lunak. Arsitektur Rational Unified Process dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Arsitektur Rational Unified Process (Santoso, 2012)

Tahap pengembangan sistem informasi dilakukan hanya pada tahapan *Core Process Workflow*, dan yang dilakukan ada lima tahap dari enam tahap yang ada, yaitu *Business Modeling Workflow*, *Requirement Workflow*, *Analysis and Design Workflow*, *Implementation Workflow*, dan *Test Workflow*.

a. *Business Modeling Workflow* (Pemodelan proses tata laksana)

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, maka tahapan pengembangan sistem dapat dimulai dengan memodelkan proses tatalaksana instansi. Tahap ini dilakukan untuk memahami bagaimana sebuah sistem bekerja. Dalam pelaksanaannya tahap ini dilakukan dengan membuat BPMN (*Business Process Model Notation*) sistem.

b. *Requirement Workflow* (Deskripsi kebutuhan)

Berdasarkan data yang telah didapatkan sebelumnya dan pemodelan proses bisnis yang telah dilakukan, maka selanjutnya dilakukan tahap deskripsi kebutuhan. Tahap ini dilakukan penelusuran mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan oleh instansi pada sistem yang dibangun. Dalam pelaksanaannya tahap ini dilakukan dengan membuat tabel kebutuhan pengguna.

c. *Analysis and Design Workflow* (Analisis dan Desain)

Berdasarkan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna, dilakukan analisis terhadap sistem yang akan dibangun dan bagaimana tampilan desain dari sistem informasi yang akan dibangun. Tahap ini melakukan analisis terhadap kebutuhan. Dalam pelaksanaannya tahap ini dilakukan dengan membuat Diagram Hubungan Entitas, Diagram Kelas, Kelas Analisis dan Antarmuka.

d. *Implementation Workflow*(Tahap Implementasi)

Tahap ini melakukan implementasi pengkodean terhadap apa yang telah dianalisis dan didesain sebelumnya. Dalam pelaksanaannya tahap ini dilakukan dengan melakukan pengkodean sistem website dengan menggunakan bahasa PHP dengan database PostgreSQL dan pengkodean sistem android dengan bahasa Java.

e. *Test Workflow*(Tahap Pengujian)

Tahap ini melakukan pengujian terhadap sistem informasi yang telah dibuat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode *Black Box Test*. Dalam pelaksanaannya tahap ini dilakukan dengan membuat table pengujian sistem.

Tahapan yang tidak dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu *deployment workflow*, yang merupakan bagian terakhir dari tahapan pengembangan. Sistem yang dibangun tidak disebarluaskan secara luas,

RUP memiliki empat fase yang dilakukan secara iteratif, yaitu *inception*, *elaboration*, *construction*, dan *transition*. Dari keempat fase tersebut, pada penelitian ini hanya membahas tiga fase, yaitu *inception*, *elaboration*, dan *construction*. Berikut penjelasan dari fase tersebut.

a. *Inception*

Pada fase *inception* (permulaan) ini, yang dilakukan adalah memodelkan bagaimana proses tatalakasan dari sistem administrasi pengajuan perkara dan mendefinisikan kebutuhan pengguna terhadap proses tersebut.

b. *Elaboration*

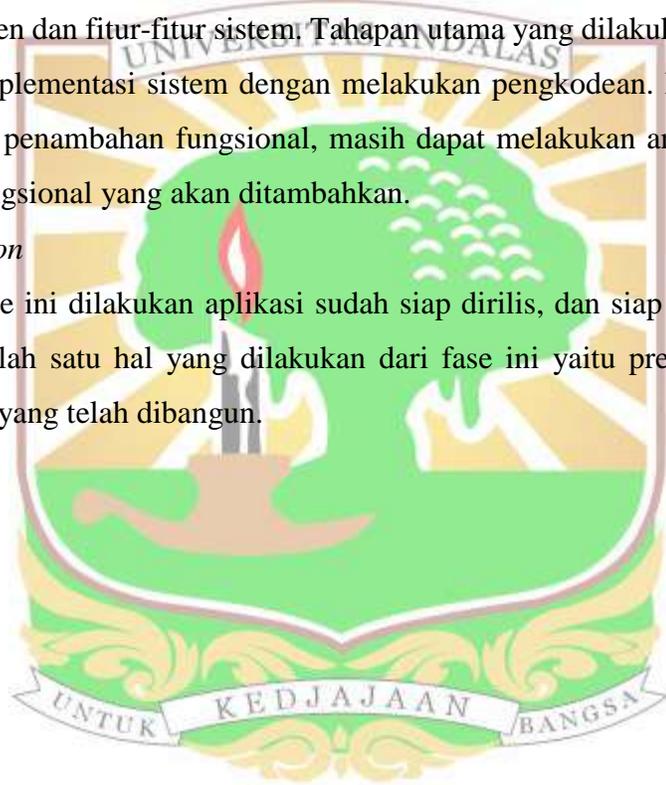
Pada fase *elaboration* (perluasan/perencanaan) yang dilakukan terfokus pada perencanaan arsitektur sistem. pada fase ini fokus yang dilakukan yaitu analisis dan desain terhadap sistem administrasi pengajuan perkara yang akan dibangun. Pada fase ini masih memungkinkan untuk melakukan perbaikan jika terdapat kekurangan pada pemodelan tatalaksana dan pendefinisian kebutuhan sistem.

c. *Construction*

Pada fase *construction* (konstruksi) yang dilakukan adalah pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem. Tahapan utama yang dilakukan pada tahap ini yaitu implementasi sistem dengan melakukan pengkodean. Pada fase ini jika terdapat penambahan fungsional, masih dapat melakukan analisis dan desain pada fungsional yang akan ditambahkan.

d. *Transition*

Pada fase ini dilakukan aplikasi sudah siap dirilis, dan siap di sebarakan pada *user*. Salah satu hal yang dilakukan dari fase ini yaitu presentasi hasil dari aplikasi yang telah dibangun.



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Terdiri dari subbab Peradilan Tata Usaha Negara, *Rational Unified Process*, Dan Studi Literatur.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Berisi hasil analisis dan rancangan yang dilakukan pada penelitian. Terdiri dari subbab Analisis Sistem dan Perancangan. Dalam subbab Analisis Sistem membahas BPMN, Kebutuhan Fungsionalitas Sistem, Usecase Diagram, Skenario Usecase, Sequence Diagram dan Class Analysis. Dalam subbab Perancangan membahas ERD, Statechart Diagram, Diagram Kelas, dan Antarmuka.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Berisi hasil dari penelitian. Terdiri dari subbab implementasi dan subbab pengujian. Dalam subbab implementasi membahas mengenai batasan implementasi, spesifikasi perangkat, pengkodean. Dalam subbab pengujian berisi fokus pengujian, pengujian per-item dan kesimpulan hasil pengujian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Terdiri dari subbab kesimpulan dan subbab saran.